



**SERI KEBIJAKSANAAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Link & Match

Direktorat
Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

LINK & MATCH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1993**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memasyarakatkan kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk Kelompok Kerja Pemasyarakatan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0280/P/1993 tanggal 26 Juli 1993. Maksud dibentuknya Kelompok Kerja ini adalah untuk menanggapi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai berbagai kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Topik-topik yang dimasyarakatkan disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang dan banyak disoroti oleh masyarakat, baik isu-isu yang bersifat terus menerus (latent) maupun yang bersifat temporer.

Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Kerja ini menggunakan dua strategi. **Pertama**, menanggapi secara proporsional isu-isu yang muncul dalam masyarakat mengenai pendidikan dan kebudayaan. **Kedua**, secara teratur memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berbagai kebijaksanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga masyarakat memiliki wawasan dan pengertian yang benar mengenai kebijaksanaan tersebut.

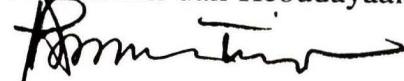
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas yang terdiri atas Satuan Tugas Media Televisi, Satuan Tugas Media Radio, Satuan Tugas Media Cetak, dan Satuan Tugas Khusus. Keempat Satuan Tugas tersebut bekerja secara terpadu di bawah kendali Tim Pengarah Kelompok Kerja ini.

Buku ini menyajikan naskah induk tentang **Link & Match**. Penyusunan naskah induk ini bertujuan agar ada kesamaan bahasa mengenai materi yang dimasyarakatkan sehingga naskah induk ini dapat berfungsi sebagai kerangka acuan yang efektif bagi Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian naskah induk ini disusun untuk menjadi pegangan bagi Kelompok Kerja Pemasarakatan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jakarta, 30 Nopember 1993

Ketua Tim Pengarah
Kelompok Kerja Pemasarakatan
Kebijaksanaan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. A. W. Pratiknya

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum Link & Match	3
III. Pentingnya Link & Match	5
IV. Konsep dan Spektrum "Link & Match" ...	8
V. Strategi Pokok Operasionalisasi	
"Link & Match"	14
VI. Peranserta Masyarakat dalam Pengembangan	
"Link & Match"	17

LINK & MATCH

I. Pendahuluan

Kebijakan "link & match" merupakan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan, yaitu relevansi dengan kebutuhan pembangunan umumnya dan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, serta dunia industri khususnya. Dalam konteks empat tema pokok kebijakan pendidikan nasional yang meliputi pemerataan kesempatan, peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi, "link & match" berkenaan dengan relevansi. Jadi esensi relevansi adalah upaya menciptakan keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dan pembangunan.

Dalam penjabarannya, "link and match" berkaitan dengan tiga aspek lain, yaitu pemerataan kesempatan, kualitas, dan efisiensi. Hal ini berarti bahwa ikhtiar pendidikan yang relevan semestinya merata baik secara kualitatif maupun kuantitatif, terbuka bagi setiap orang (peserta didik), mencapai standar tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan (berkualitas), dan efisien.

Meskipun kedengarannya baru, "link & match" sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan. Jauh sejak lima Pelita sebelumnya, keterkaitan antara dunia pendidikan dengan pembangunan telah dikemukakan, seperti dapat disimak dalam GBHN sebelumnya. Dalam perkembangan kemudian, perlunya

keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan dan pembangunan semakin dirasakan karena beberapa kecenderungan. Di antaranya:

Pertama, semakin tingginya tuntutan dunia kerja yang sejalan dengan tuntutan pembangunan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kedua, perubahan struktur dan persyaratan dunia kerja yang semakin kompetitif dan mengandalkan keahlian dalam bidang tertentu, tanpa mengabaikan wawasan dan pengetahuan secara interdisipliner.

Ketiga, kecenderungan umum dalam dunia pendidikan menunjukkan adanya perubahan cara berpikir yang memandang bahwa pendidikan semestinya menyiapkan peserta didik secara utuh, menyangkut pengetahuan, sikap, kemauan, dan keterampilannya yang fungsional bagi kehidupannya sebagai pribadi, warga negara dan warga masyarakat, serta usahanya mencari nafkah. Dengan demikian, dewasa ini, pandangan romantis mengenai pendidikan, yang cenderung memandang pendidikan dari segi tujuan perkembangan kepribadian saja kurang lagi relevan dengan perubahan dalam lingkungan strategis, tempat pendidikan berada.

Keempat, semakin populernya konsep pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang mendapatkan tekanan kuat pada awal PJPT II, khususnya Repelita VI. Dalam hal ini, pendidikan dipandang sebagai upaya pengembangan SDM yang berkualitas. Konsep PSDM mengimplikasikan bahwa pendidikan merupakan wahana atau instrumen untuk pembangunan dan perubahan sosial, dan pendidikan

merupakan investasi untuk masa masa depan. Dalam kerangka PSDM ini, keberhasilan pendidikan ditakar dengan menggunakan parameter-parameter yang terukur dan operasional seperti tingkat balikan (rate of return), indeks efisiensi dan efektivitas, dan lain-lain.

Mengingat spektrum "link & match" sangat luas, maka apa yang dikemukakan dalam risalah ini dibatasi pada link & match antara pendidikan dengan kebutuhan pembangunan atau "link & match eksternal". Sementara itu, keterkaitan, keterpaduan, dan keserasian antara berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, serta antar-daerah (atau link & match internal), yang juga sangat penting untuk diperhatikan, di luar pembahasan risalah ini.

II. Dasar Hukum "Link & Match"

Pendidikan nasional merupakan perwujudan dari amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu sebagai upaya "mencerdaskan kehidupan bangsa." Sementara itu, GBHN 1993 mengemukakan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan

semangat kebangsaan, dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa depan. Iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju.

Dalam tujuan pendidikan nasional tersebut terkandung tiga dimensi tujuan, yaitu: (a) perkembangan pribadi peserta didik, (b) pembinaan peserta didik agar menjadi warga masyarakat dan negara yang baik, (c) penyiapan peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kemampuan, dan keterampilan yang fungsional bagi kehidupan pribadinya, masyarakatnya, dan bangsanya. Dua dimensi tujuan yang disebut pertama merupakan tujuan intrinsik dari pendidikan, sedangkan tujuan yang disebut terakhir menunjuk pada dimensi tujuan instrumental, yaitu pendidikan sebagai wahana atau instrumen bagi perbaikan taraf hidup dan peningkatan pembangunan.

Sebagai suatu kebijakan, "link & match" berkaitan dengan ketiga tujuan tersebut, bukan hanya mengacu kepada tujuan instrumental dari pendidikan. Hal ini didasari dua alasan.

Pertama, secara normatif, tujuan pendidikan nasional menekankan keutuhan dan keserasian, artinya pembinaan peserta didik tidak bersifat parsial hanya untuk dimensi tertentu sesuai dengan prinsip "manusia Indonesia seutuhnya". Dalam praktek kependidikan yang dikaitkan dengan pembangunan, upaya mempertahankan keutuhan ini tidak

selalu mudah. Selalu terjadi tarik menarik antara berbagai titik pandang atau kepentingan dalam masyarakat. Tanpa mengabaikan adanya tarik menarik itu, pendidikan yang sejati dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan secara seimbang dan selaras. Namun untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja/dunia usaha/industri, maka GBHN 1993 memberikan perhatian yang lebih kepada dimensi instrumental untuk lima tahun mendatang, dan ini merupakan komitmen nasional. Meskipun demikian, perlu tetap disadari bahwa kebijakan ini selalu ditempatkan dalam konteks manusia seutuhnya.

Kedua, meskipun dimensi instrumental mendapatkan tekanan khusus, pada dasarnya link & match bukan hanya berlaku untuk hal-hal yang sifatnya instrumental, melainkan yang intrinsik. Hal ini berarti bahwa arah dan bobot perkembangan kepribadian peserta didik semestinya sesuai dengan tuntutan yang berkembang dalam lingkungan sosial dan bangsa. Begitu juga dengan pembinaan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik seharusnya sesuai dengan semangat zaman dan perkembangan dalam lingkungan strategis sebagai suatu bangsa dan bagian dari masyarakat regional dan bahkan internasional. Untuk itu, dimensi intrinsik dari tujuan pendidikan semestinya selalu disegarkan agar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan lingkungan yang selalu berubah.

III. Pentingnya "Link & Match"

Dari perspektif pendidikan sebagai wahana untuk menunjang pembangunan dalam berbagai sektor dan sub-sektor, ada beberapa fakta yang memperkuat perlunya

usaha ke arah lebih menciptakan "link and match" antara pendidikan dan pembangunan, khususnya dengan dunia kerja/usaha/industri.

Pertama, tingkat balikan (*rate of return*, ROR) pendidikan di Indonesia pada setiap jenjang masih belum begitu tinggi. Berbagai telaah yang dilakukan (Clark, 1983; Psacharopoulos, 1982, Budiono & McMahan, 1989) mengungkapkan bahwa ROR pendidikan adalah: 0,10 - 0,20 untuk SD, 0,16 - 0,25 untuk SLTP, 0,16 - 0,32 untuk Sekolah Menengah (SLTA), 0,16 - 0,22 untuk Program Diploma dan sederajat, dan 0,13 - 0,21 untuk tingkat sarjana. Angka tersebut dapat mengandung tiga kemungkinan: (a) kurangnya peluang kerja yang tak tersedia dalam masyarakat khususnya dalam dunia usaha dan industri serta sektor informal sehingga lulusan pendidikan belum secara fungsional dapat menggunakan segenap kemampuan yang diperolehnya secara maksimal dalam kehidupan; (b) peluang kerja tersedia, namun apa yang dimiliki tersebut kurang sesuai dengan peluang kerja yang tersedia itu; (c) kemampuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan mengarah pada kemampuan tertentu, sementara dunia kerja menuntut kemampuan yang lain dalam jumlah yang terbatas.

Kedua, dari pemantauan di berbagai daerah, diperoleh informasi bahwa di daerah itu cukup tersedia peluang kerja untuk para lulusan sekolah pada tingkat pendidikan menengah (semi-profesional) yang mengandalkan tingkat keterampilan tertentu yang disertai penguasaan ilmu tertentu (*skills and knowledge*). Namun jika ada satu lowongan, yang melamar ada 10 orang lulusan sekolah, tapi tidak seorang pun memenuhi syarat yang diminta oleh dunia kerja. Kalaupun

terpaksa mereka diterima, maka persyaratan terpaksa diturunkan, dan konsekuensinya dunia usaha harus mengeluarkan dana ekstra untuk pelatihan (lebih dari sekadar orientasi) sebelum yang bersangkutan dapat terjun ke dalam dunia kerja.

Ketiga, secara makro, data arus peserta didik mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi pada awal tahun 1990-an masih menunjukkan ketimpangan, yang tidak sesuai dengan kecenderungan perubahan yang terjadi dalam dunia kerja, yaitu perubahan dari: sektor pertanian ke industri, dari penguasaan kemampuan umum ke penguasaan suatu keterampilan khusus yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Faktanya adalah berikut ini.

- a. Dari seluruh lulusan SLTP yang melanjutkan ke Sekolah Menengah, 34% memasuki Sekolah Menengah Kejuruan, dan selebihnya ke Sekolah Menengah Umum (termasuk SMA dan Madrasah Aliyah).
- b. Dari seluruh lulusan Sekolah Menengah (SLTA) setiap tahun, 30% lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan dan 70% dari Sekolah Menengah Umum.
- c. Pada tingkat perguruan tinggi, setiap tahun sebagian besar lulusan adalah dari bidang ilmu-ilmu sosial, dan hanya sekitar 10% berasal dari bidang sains dan teknologi.
- d. Setiap tahun, sekitar 4 juta lulusan SD tidak melanjutkan ke SLTP, dan sekitar 900 ribu lulusan SLTP tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah

(SLTA), tanpa memiliki keterampilan untuk bekerja dan mencari nafkah.

Angka tersebut baru menyangkut bidang yang dipelajari peserta didik, belum menyangkut kemampuan lulusan, karena gejala kualifikasi kurang (*under-qualification*) dan *mismatch* dapat saja terjadi pada lulusan pendidikan kejuruan di tingkat SLTP dan Sekolah Menengah (SLTA) maupun di tingkat pendidikan tinggi akibat kurang sesuainya dunia pendidikan dan dunia kerja. Pada tingkat sekolah menengah, beberapa studi membuktikan bahwa ROR STM malah lebih rendah (16-18%) dari ROR SMA (19-32%).

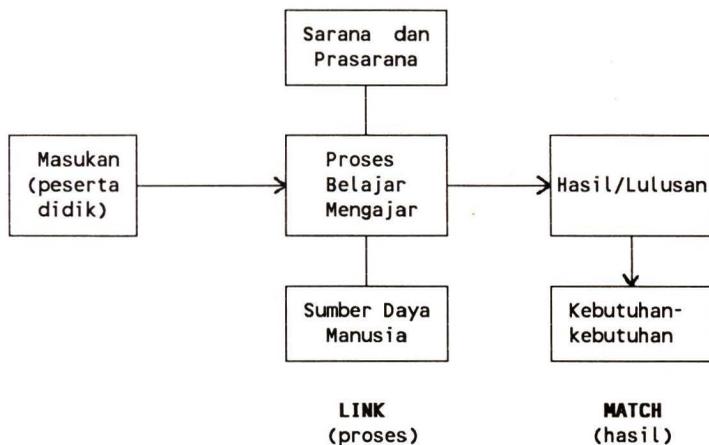
Jadi, *mismatch* mengandung dua dimensi: horisontal dan vertikal. Dimensi horisontal menunjuk pada jumlah lulusan pendidikan setiap tahun berdasarkan bidang keahlian yang tidak sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang mengarah pada penguasaan kemampuan spesifik (di samping kemampuan umum yang bertujuan mengembangkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik, atau tujuan intrinsik pendidikan). Dimensi vertikal menunjuk kepada tingkat/derajat relevansi kemampuan para lulusan dengan dunia kerja; ada yang tinggi relevansinya dan ada yang rendah.

IV. Konsep dan Spektrum "Link & Match"

"Link" secara harfiah berarti ada pertautan, keterkaitan, atau hubungan interaktif, dan "match" berarti cocok. Pada dasarnya, link dan match itu adalah dengan kebutuhan (needs, demands). Kebutuhan dalam pembangunan sangat luas, bersifat multidimensional, dan multisektoral,

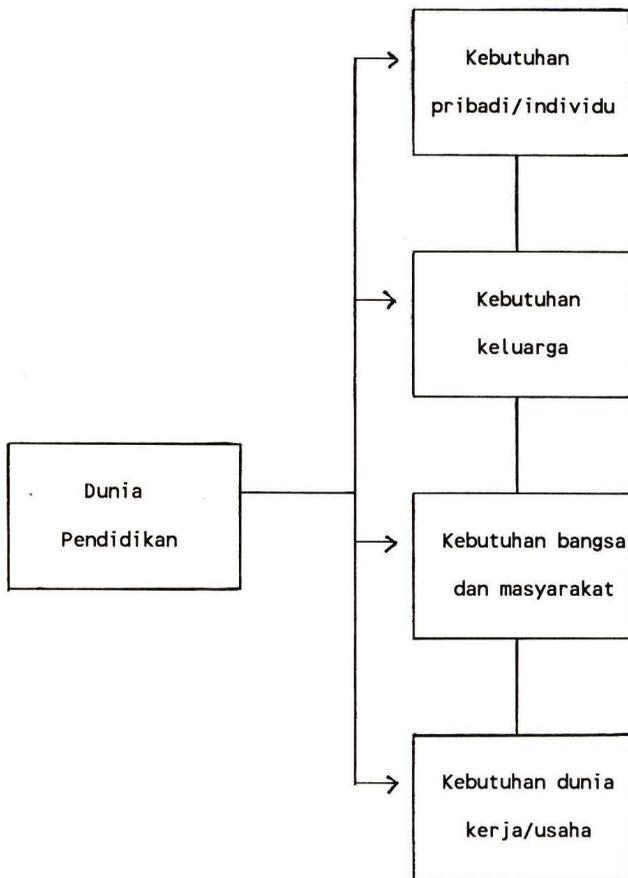
mulai kebutuhan peserta didik sendiri, kebutuhan keluarganya, kebutuhan untuk pembinaan warga masyarakat dan warga negara yang baik, dan kebutuhan dunia kerja.

Dari perspektif ini, "link" menunjuk pada PROSES, yang berarti bahwa proses pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga HASIL-nya pun cocok ("match") dengan kebutuhan tersebut, baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi, maupun dari segi waktunya. Lihat Gambar 1.



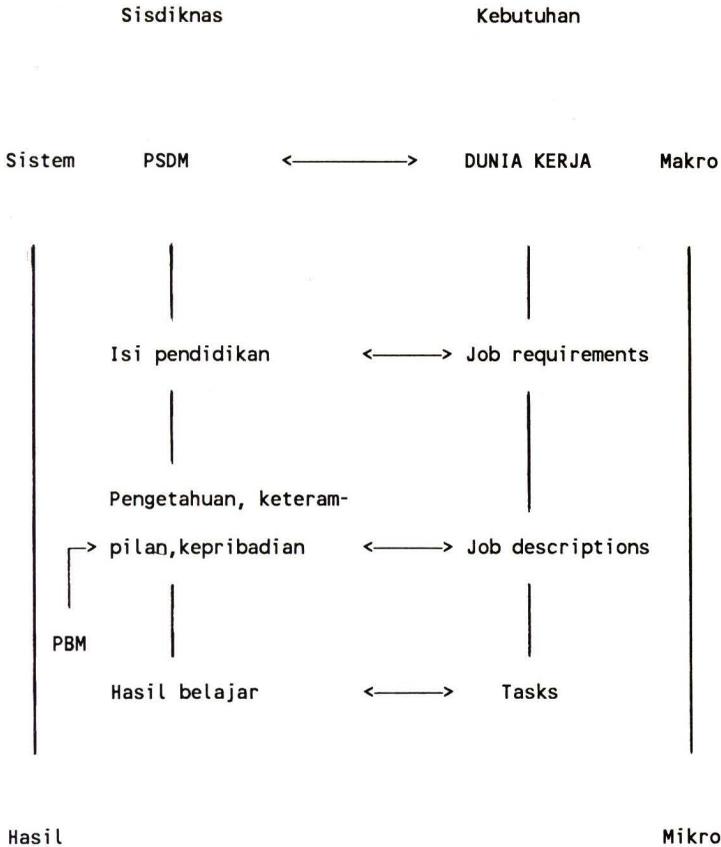
Gambar 1. "Link & Match" Proses dan Hasil Pendidikan

Berdasarkan gambar di atas, maka konsep "link & match" pada dasarnya adalah "supply-demand" dalam arti luas, yaitu dunia pendidikan sebagai penyedia SDM, dan individu, masyarakat, serta dunia kerja sebagai pihak yang membutuhkan. Lihat Gambar 2.



Gambar 2. Pendidikan dan Berbagai Kebutuhan

Di antara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan/tuntutan dunia kerja/dunia usaha/industri, yang dirasakan amat mendesak dalam memasuki PJPT II. Oleh sebab itu, maka prioritas "link & match" diberikan pada pemenuhan kebutuhan dunia kerja. Lihat Gambar 3.



Gambar 3. "Link & Match" Pendidikan dan Dunia Kerja

Link & match antara pendidikan dan pembangunan perlu mendapatkan tekanan karena dalam kenyataannya, pada setiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan -- sesuai dengan fungsi dan tujuan institusionalnya yang termaktub dalam UUSPN -- terdapat dimensi tujuan yang mengandung pesan perlunya keterkaitan dan kesesuaian tersebut.

Menurut GBHN 1993 dan UUSPN, tiga jenjang pendidikan yaitu dasar, menengah, dan tinggi mempunyai tujuan kelembagaan yang relatif berbeda. Pendidikan dasar bertujuan untuk pembentukan pribadi yang berbudi pekerti luhur, beriman, dan bertaqwa, berkemampuan, dan mempunyai keterampilan dasar untuk pendidikan selanjutnya di tingkat menengah, dan untuk bekal hidup. Yang perlu digarispawahi di sini adalah, Dikdas harus juga mampu memberikan **keterampilan dasar** untuk bekal hidup, yaitu bekerja untuk mencari nafkah, mengingat tidak semua anak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Pendidikan menengah juga diarahkan untuk dua tujuan utama, yaitu pendidikan lanjutan ke jenjang pendidikan tinggi dan pemberian keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja, dengan pemberian tekanan khusus pada pendidikan menengah kejuruan. Dalam Pelita VI ini, selain pemberian keterampilan dasar bagi peserta didik di Pendidikan Dasar, pendidikan kejuruan menengah perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh sehingga bukan hanya "link", melainkan lebih "match" dengan dunia kerja, meskipun diakui bahwa dibandingkan dengan pendidikan menengah umum, daya dukung sumber daya pendidikan kejuruan jauh lebih mahal.

Pada jenjang Pendidikan Tinggi, kedua dimensi tujuan itu diwakili dalam istilah kemampuan "akademik" dan

"profesional". Kemampuan akademik menekankan kemampuan penguasaan dan pengembangan ilmu, dan kemampuan profesional menekankan kemampuan dan keterampilan kerja. Pada jenjang ini, Pendidikan Tinggi dituntut untuk lebih mengarahkan peserta didik untuk penguasaan IPTEK, dan secara kelembagaan, riset dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan perlu mendapatkan perhatian.

Hal itu berarti bahwa "link & match" berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. Namun perlu dikemukakan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan dan semakin spesifik bidang yang dipelajari, maka semakin tinggi derajat "link and match"-nya. Tingkat "link & match" pada jenjang pendidikan dasar akan berbeda dengan sekolah menengah, dan begitu juga dengan pendidikan tinggi.

Pendidikan dasar lebih ditujukan untuk pembekalan kemampuan dasar berupa kemampuan membaca, menulis, berhitung, bahasa Indonesia, dan keterampilan lainnya yang diberikan melalui muatan lokal. Apa yang mereka peroleh itu harus fungsional bagi kehidupannya. Sementara itu, sekolah menengah, khususnya sekolah menengah kejuruan, dituntut untuk benar-benar memiliki "link and match" dengan dunia kerja. Jadi, pengembangan link & match seyogyanya memperhatikan keragaman tujuan institusional setiap jenis dan jenjang pendidikan.

V. Strategi Pokok Operasionalisasi "Link & Match"

Untuk menciptakan "link and match" antara pendidikan dan dunia kerja/dunia usaha/industri, diperlukan usaha-usaha secara reciprocal antara kedua pihak. Pendidikan dan dunia kerja serta masyarakat perlu melakukan dialog untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, dan menentukan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan itu.

Untuk itu, dunia usaha/industri dituntut untuk lebih membuka diri terhadap pendidikan, baik dalam arti sikap maupun tindakan nyata termasuk menjadi tempat magang dan praktek lapangan bagi para peserta didik. Di pihak lain, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan konsolidasi mulai tahap perencanaan sampai implementasi dan evaluasinya sehingga kebijakan ini mempunyai arti yang maksimal, sesuai dengan tujuannya.

Strategi dasar implementasi "link & match" menurut jenis, jenjang, dan jalur pendidikan adalah sebagai berikut.

Pada tingkat SD: (1) meningkatkan kemampuan baca-tulis-hitung, termasuk baca-tulis kritis; (2) memaksimalkan muatan lokal untuk kemampuan kegiatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan sejauh mungkin

melibatkan peranserta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini.

Pada tingkat SLTP: (1) melibatkan peranserta masyarakat dalam pengisian muatan lokal; (2) memperkuat pendidikan yang memberikan keterampilan dasar bagi peserta didik; (3) mengadakan kegiatan kunjungan dan praktek lapangan yang dikaitkan dengan muatan lokal atau kegiatan ekstra dan ko-kurikuler; (4) meningkatkan penggunaan media dan alat pembelajaran yang diambil langsung dari lingkungan; (5) melengkapi sarana, prasarana, dan tenaga untuk menangani program ini.

Pada tingkat Sekolah Menengah Umum: (1) melibatkan masyarakat dalam mengisi muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan setempat; (2) menggiatkan kunjungan lapangan, praktek lapangan di dunia kerja pada waktu tertentu; (3) meningkatkan kerja sama yang lebih intensif dan ekstensif dengan dunia usaha dan dunia industri; dan (4) melengkapi sarana, prasarana, dan tenaga untuk menunjang program ini.

Pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan: (1) meningkatkan program magang di dunia usaha/industri selama jangka waktu tertentu; (2) menggiatkan kunjungan lapangan dan praktek lapangan sebagai bagian integral dari kurikulum; (3) meningkatkan jumlah dan mutu sarana, prasarana, dan tenaga; dan (4) meningkatkan daya tarik Sekolah Menengah Kejuruan

sebagai pilihan yang mempunyai prospek yang baik untuk masa depan.

Pada tingkat perguruan tinggi: (1) meningkatkan dialog dan kerja sama dengan dunia kerja, dunia usaha, dan industri dalam bidang pendidikan dan penelitian; (2) meningkatkan kegiatan praktek lapangan, kuliah kerja, dan magang sesuai dengan bidang studinya dengan menggunakan sistem kupon (voucher); (3) meningkatkan jumlah mahasiswa yang mempelajari sains dan teknologi sampai sekitar 25% dari seluruh populasi mahasiswa; dan (4) memperkuat sarana, prasarana, dan tenaga baik untuk program akademik maupun profesional.

Pada jalur pendidikan luar sekolah: (1) meningkatkan kerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dalam pemanfaatan BLK dan KLK; (2) menggiatkan Kejar Paket B dan meningkatkan jumlah kelompok belajar dan jumlah warga belajar, serta melengkapi tenaga dan sarana penunjangnya; dan (3) menciptakan jalur-jalur untuk penyaluran lulusan ke pasar kerja.

Untuk mewujudkan kebijakan link & match beserta strategi pokok operasionalisasinya, diperlukan sosialisasi kepada lingkungan intern pendidikan dan masyarakat umumnya, yang meliputi penyamaan persepsi, pengembangan komitmen, dan penyusunan rencana tindakan.

VI. Peranserta Masyarakat dalam Pengembangan "Link & Match"

Untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, upaya menyertakan masyarakat dalam meningkatkan "link & match", pertama-tama dikembangkan melalui dialog antara pendidikan dan masyarakat, meliputi dunia usaha, industri, tokoh-tokoh masyarakat, dan mereka yang mempunyai kepedulian yang besar terhadap pendidikan.

Upaya melibatkan peranserta masyarakat dalam melaksanakan kebijakan "link & match" terutama dilakukan melalui pengisian muatan lokal; dan muatan lokal pada intinya dimaksudkan untuk menumbuhkan potensi, keunggulan, dan kepentingan lokal/wilayah tempat sekolah berada. Sementara itu, untuk setiap jenjang pendidikan, pelibatan masyarakat adalah sebagai berikut:

Di SD, masyarakat dilibatkan dalam mengisi muatan lokal (6 jam) mulai perencanaan sampai pelaksanaan, misalnya dengan membawa murid-murid SD untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu di daerahnya atau mengundang nara sumber ke sekolah. Di SLTP, masyarakat juga dilibatkan dalam mengisi muatan lokal (6 jam) dengan lebih menekankan kepada kegiatan yang dapat membekali para siswa dalam mengenal potensi dan peluang yang tersedia dalam lingkungan sekitarnya serta kemampuan yang dituntut

untuk memanfaatkan potensi dan peluang tersebut. Di Sekolah Menengah Umum, keterlibatan masyarakat juga terutama dalam mengisi muatan lokal. Pada jenjang ini, para siswa dimungkinkan pula untuk mengadakan praktek lapangan sesuai dengan minat dan kebutuhannya.

Di Sekolah Menengah Kejuruan, keterlibatan masyarakat dalam menciptakan link & match dilakukan lebih nyata lagi sesuai dengan tujuan kelembagaan sekolah ini. Upaya yang telah dan sedang dilakukan sekarang adalah melakukan dialog intensif dengan dunia usaha dan industri. Di antaranya, kerjasama dengan KADIN untuk pelaksanaan sistem magang yang dikuatkan dengan *Memorandum of Understanding* (MOU). Kerja sama serupa juga dilakukan dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Asosiasi-asosiasi lain di luar Kadin, dan perusahaan-perusahaan industri seperti National Gobel, Toyota, Garuda, IPTN, dan PAL. Keterlibatan itu meliputi perencanaan program, penyusunan kurikulum, penyelenggara-an pendidikan/magang, evaluasi program dan hasil, dan pemasaran lulusan.

Di Perguruan Tinggi, keterlibatan masyarakat dilakukan melalui kerja sama riset dan pengembangan, yang ditujukan dalam rangka pengembangan potensi daerah khususnya dalam bidang ekonomi. Di samping itu, dilakukan juga praktek kerja mahasiswa di dunia industri. Pada saat ini Ditjen Dikti sedang mengembangkan konsep kerjasama

perguruan tinggi dengan industri kecil dan menengah dengan cara memberikan kupon (voucher) kepada perusahaan, yang dengan kupon tersebut pihak perusahaan akan mendapatkan dana perangsang untuk melakukan penelitian bekerjasama dengan perguruan tinggi guna meningkatkan kinerja perusahaan.

Pada jalur pendidikan luar sekolah, keterlibatan masyarakat dalam menciptakan keterkaitan dan kesepadanan adalah lebih memperkuat dan mengarahkan apa yang telah ada melalui bimbingan, bantuan, dan kemudahan dalam mendapatkan izin. Hal ini dilakukan mengingat pada dasarnya, pendidikan luar sekolah sebagian besar tumbuh dari kebutuhan masyarakat sendiri yang dikaitkan dengan kebutuhan dunia kerja.

Perpustakaan
Jenderal